



Media: Koran Tempo

Hari: Sabtu

Tanggal: 23 Mei 2009

Halaman: B3

**PENATAAN
ITU JANGAN
SAMPAI ADA
PENGGUSURAN.**

Jumlah Pedagang Malioboro Dibatasi

YOGYAKARTA — Jumlah pedagang di kawasan Malioboro akan ditekan supaya tidak bertambah. Pembatasan itu perlu dilakukan agar kondisi pelataran Jalan Malioboro terkendali dan rapi. Untuk itu, Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kawasan Malioboro, yang akan bekerja mulai Juni mendatang.

"Kita melakukan 'zero growth' alias tidak ada penambahan pedagang baru, untuk memudahkan penataan kawasan Malioboro yang semakin terlihat semrawut," kata Haryadi Suyuti, Wakil Wali Kota Yogyakarta, kemarin. Menurut dia, beban kawasan Malioboro yang meningkat pesat mengakibatkan perilaku kawasan padat itu harus dibatasi.

Haryadi optimistis, Malioboro, yang selama ini terlihat semrawut, kumuh, dan tidak tertata, dapat lebih terkendali. UPT yang menjembatani kepentingan tersebut melibatkan enam instansi, yaitu Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Ketertiban, Dinas Perumahan dan Prasarana Wilayah, serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertanian (Disperindagkoptan).

Menurut Haryadi, kerja tim itu wajib bersinergi, untuk memunculkan solusi terbaik bagi ikon pariwisata Yogyakarta. "Instansi ini harus mampu bekerja sama yang koordinatornya di bawah Disperindagkoptan," kata dia.

Kini, Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan sosialisasi kepada 19 Paguyuban Kawasan Malioboro (PKM), yang terdiri atas pedagang kaki lima, asongan, seniman, juru parkir, tukang becak, hingga pengusaha. Haryadi berharap, mereka harus memiliki kesadaran dan komitmen untuk mewujudkan keteraturan Malioboro.

Memang, sejauh ini penataan Malioboro belum mengarah pada pembangunan fisik, karena masih diprioritaskan pada aspek teknis dan sosial. "Untuk pembangunan fisik, belum kita bicarakan, hanya saja rencana pembangunan sudah ada *planning*-nya," kata Haryadi lagi.

Sementara itu, Sujarwo Putra, Presidium PKM, mengatakan pembatasan bisa dilakukan asalkan Pemerintah Kota Yogyakarta tidak melakukan aksi pengusuran yang dapat merugikan pelaku usaha. "Penataan Kawasan Malioboro harus mementingkan kebutuhan para pedagang dan komunitas Malioboro, jangan sampai ada pengusuran," kata dia.

Sujarwo menambahkan, pedagang di kawasan Malioboro kini ada sekitar 3.000 orang, tukang parkir lebih dari 100 orang, dan penarik becak yang sering mangkal sekitar 600 orang.

● MUH SUFULAH

pada Yth. :
 1. Wali Kota Yogyakarta
 2. Wali Kota Yogyakarta
 3. Kepala Dinas Perhubungan
 4. Kepala Dinas Ketertiban
 5. Kepala Dinas Perumahan dan Prasarana Wilayah
 6. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertanian

pada Yth. :
 1. Kepala Disperindagkoptan
 2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 3. Kepala Dinas Perhubungan
 4. Kepala Dinas Ketertiban
 5. Kepala Dinas Perumahan dan Prasarana Wilayah
 6. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertanian

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			
3. Dinas Pemukiman dan Prasarana			
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per			
5. Dinas Ketertiban			
6. Badan Lingkungan Hidup			

